



KEBANGKITAN KEKUATAN NORMATIF TIONGKOK DI EROPA: STUDI KASUS PENGARUH TIONGKOK TERHADAP HUNGARIA DALAM UNI EROPA PASCA INISIASI 16 + 1

Bagus Rahmadia Pranawa, Reni Windiani, Fendy Eko Wahyudi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Hungary, under Prime Minister Viktor Orbán, through various policies, has occupied a unique position as a disruptive actor in the European Union. The EU considers that Hungary is no longer in line with EU values and has created complicated conditions for the EU. One form of Hungarian policy that has had a disruptive impact on the EU is Hungary's political support for China within the EU, even though China is considered a rival of the EU and has differing values than the EU. This research aims to explain why Hungary decided to support China. In this study, the authors use the concept of normative power, which analyzes how an actor can affect what is normal in international relations through the spread of universal values and norms. The author uses this concept to analyze the fulfillment of the characteristics criteria and the distribution factors of normative power. The research finds that Hungary has accepted, implemented, and disseminated China's promoted values and alternative global politics model. These findings are proven through various policies and statements from the Hungarian government. This acceptance resulted in Hungary's deviation from EU values through various policies, including Hungary's policy of supporting China.

Keywords: *China, Hungary, European Union, Deviance, Normative Power*

PENDAHULUAN

Hungaria dibawah pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orbán peran unik dalam skena politik Uni Eropa, terutama dengan kebijakan Hungaria yang berusaha mendekati Tiongkok melalui berbagai manuver politik di Uni Eropa. Sebagai contoh, pada Maret 2017 Hungaria menggunakan hak veto dalam parlemen Uni Eropa untuk membatalkan kebijakan luar negeri dari Uni Eropa yang ingin mengeluarkan protes terhadap Tiongkok terkait dugaan adanya penyiksaan terhadap beberapa aktivis HAM dan pengacara yang ditangkap oleh pemerintah Tiongkok (Denyer & Rauhala, 2017).

Pada Juli 2016, Hungaria menggunakan hak veto untuk menolak pernyataan dan penerimaan Uni Eropa terkait dibutuhkannya Mahkamah Internasional terkait isu klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan (Pepermans, 2018). Pada April 2021 Hungaria menggunakan hak veto untuk memblokir pernyataan Uni Eropa yang berencana mengkritisi serta mengancam Tiongkok atas diterbitkannya undang-undang terkait Hong Kong yang diduga melanggar demokrasi dan HAM (Rettman, 2021). Hal ini juga diiringi dengan berbagai ancaman Hungaria terhadap Uni Eropa, baik ancaman Veto

maupun ancaman lain seperti ancaman akan beralih ke Tiongkok apabila Hungaria tidak diberikan biaya bantuan lebih dari Uni Eropa (Trebitsch, 2018).

Kebijakan Hungaria tersebut menjadikan Hungaria sebagai “Aktor Pengacau” Uni Eropa (Krekó, 2018) dan menguatkan posisi Tiongkok dalam ranah politik Eropa (Vangeli, 2018). Kebijakan tersebut juga menimbulkan kritisi dari pihak Uni Eropa terhadap Hungaria dan mengurangi tingkat hubungan antara Hungaria dengan Uni Eropa. Tiongkok sendiri juga diklasifikasikan oleh Uni Eropa sebagai “rival sistemik” (EEAS, 2022). Kritisi terhadap kebijakan Hungaria untuk melindungi Tiongkok juga berujung pada munculnya anggapan dari Uni Eropa bahwa Hungaria tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai dasar Uni Eropa (AFP, 2021), dan hal tersebut telah dibawa ke ranah hukum melalui Mahkamah Eropa dengan tuduhan terhadap Hungaria mengenai pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar Uni Eropa (EUR-LEX, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Apa penyebab Hungaria mengambil kebijakan untuk mendukung Tiongkok secara politis dalam lingkup politik Uni Eropa?”**

Sekilas terlihat motif utama Hungaria adalah peningkatan potensi ekonomi melalui perdagangan dan Investasi dari Tiongkok. Hal tersebut dapat dilihat dalam inisiasi 16+1 yakni kerjasama ekonomi antara Tiongkok dengan 16 negara Eropa Tengah dan Timur untuk mendapatkan keuntungan ekonomi lebih dari Tiongkok. Namun, potensi keuntungan ini tidak sepenuhnya benar. Hungaria hingga saat ini masih menjadikan negara-negara anggota Uni Eropa sebagai mitra ekonomi utama. Dalam pasar Ekspor Hungaria pada tahun 2019, 26,9% ekspor berasal dari Jerman dan Tiongkok sendiri hanya mencukupi 1,48% dari jumlah nilai ekspor (OEC, 2020). Hal ini menimbulkan kondisi dimana Hungaria berpotensi kehilangan mitra dagang utamanya akibat hubungan yang renggang antara Hungaria dengan negara-negara anggota Uni Eropa akibat kebijakan Hungaria yang mendukung Tiongkok secara politis di Uni Eropa.

Penulis melihat dari bukti yang ada, alasan Hungaria memilih Tiongkok sulit dijelaskan dari segi keuntungan ekonomi. Hal ini juga terlihat melalui beberapa penelitian dahulu. Penelitian oleh Tamas Matura meneliti hubungan antara Tiongkok dengan Hungaria pasca inisiasi 16+1 dan kebijakan *One Belt One Road* Tiongkok. Penelitian ini membahas bagaimana walaupun Tiongkok memiliki faktor “penarik” bagi Hungaria dari segi ekonomi, hubungan ekonomi beserta investasi langsung Tiongkok terhadap Hungaria masih jauh di bawah tingkat investasi dan hubungan ekonomi Hungaria dengan negara-negara anggota Uni Eropa seperti Jerman dan Perancis (Matura, 2017). Penelitian tersebut berargumen bahwa pengaruh Tiongkok terhadap Hungaria disebabkan hubungan baik antar kedua negara, baik berdasarkan faktor kesamaan nilai, tujuan dan perspektif politik, serta upaya diplomatik antar keduanya yang intensif.

Melalui pembahasan penelitian sebelumnya, penulis melihat bahwa analisis melalui perspektif nilai dapat menjawab alasan dibalik kebijakan Hungaria. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan konsep kekuatan normatif untuk menganalisis peranan norma sebagai faktor yang menyebabkan keterikatan antara Hungaria dengan Tiongkok, sekaligus menjelaskan merenggangnya hubungan antara Hungaria dengan Uni Eropa. Penulis berargumen bahwa Kekuatan Normatif Tiongkok telah hadir dan

diterima oleh Hungaria yang menyebabkan dianutnya norma yang disebarkan Tiongkok oleh Hungaria. Penerimaan norma ini menjadi salah satu faktor penyebab adanya perubahan sikap Hungaria terhadap Uni Eropa.

KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini menggunakan konsep kekuatan normatif yang dicetuskan oleh Ian Manners. Manners mendefinisikan kekuatan normatif sebagai “Kemampuan untuk mewujudkan atau mengubah sesuatu yang dianggap normal dalam hubungan internasional”(Manners, 2002). Kondisi normal merujuk terhadap penerimaan dan implementasi norma yang sedang atau seharusnya dianut oleh suatu aktor. Perubahan tersebut dilaksanakan melalui persebaran norma. Konsep ini masih berada dalam lingkup paradigma konstruktivisme, terutama konstruktivisme berbasis norma dimana norma dapat mempengaruhi perilaku negara-negara (Rosyidin, 2020). Norma sendiri merujuk pada definisi “harapan-harapan kolektif mengenai perilaku yang pantas bagi aktor dengan identitas tertentu” (Katzenstein, 1996)

Lebih lanjut, bentuk kekuatan ini bergantung pada kemampuan untuk memperjuangkan norma-norma tertentu dalam relasinya dengan aktor-aktor lain atau negara mitra dalam hubungan internasional, dan dengan demikian tidak bergantung pada kemampuan militer atau ekonomi. Suatu aktor akan dianggap memiliki kekuatan normatif apabila dapat mempengaruhi norma yang dianut oleh aktor atau negara mitra.

Manners juga mengidentifikasi enam faktor penyebaran kekuatan normatif, yakni penularan, Transferensi, difusi informasi, difusi terbuka, difusi prosedural, dan filter budaya. Penjelasan mengenai enam faktor tersebut terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Enam Faktor Penyebaran Kekuatan Normatif

No.	Faktor Penyebaran	Definisi	Contoh
1.	Penularan	Penyebaran norma secara tidak disengaja dari suatu kekuatan normatif kepada aktor politik lain	Dialog antara aktor domestik dengan aktor kekuatan normatif
2.	Transferensi	Penyebaran norma melalui pertukaran barang, perdagangan, bantuan atau bantuan teknis dengan pihak ketiga melalui sarana substantif atau keuangan	Bantuan ekonomi dari Uni Eropa kepada negara-negara berkembang
3.	Difusi Informasi	Penyebaran norma melalui komunikasi	Pernyataan dari Presiden Komisi Eropa mengenai ajakan penegakan

		strategis dari pihak kekuatan normatif	HAM untuk negara anggota Uni Eropa
4.	Difusi Terbuka	Penyebaran dikarenakan adanya kehadiran secara fisik dan nyata oleh suatu kekuatan normatif pada aktor mitra dan organisasi internasional	Penyebaran norma oleh Uni Eropa dalam forum G20
5.	Difusi Prosedural	Persebaran norma melalui institusionalisasi antara pihak kekuatan normatif dengan aktor mitra	Persebaran norma pembangunan berkelanjutan yang dianut oleh Uni Eropa kepada Indonesia melalui perjanjian <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
6.	Filter Budaya	Interaksi antara konstruksi pengetahuan dan penciptaan identitas sosial dan politik oleh aktor mitra	Diplomasi kultural dan interaksi antar masyarakat dua negara

Sumber: (Manners, 2002) diolah oleh penulis

Dalam analisis kekuatan normatif, juga diperlukan identifikasi terhadap pemenuhan kriteria karakteristik kekuatan normatif. Kriteria tersebut adalah adanya norma universal yang dianut, dijalankannya norma tersebut melalui instrumen dialog, dan adanya dampak pada aktor mitra (Manners, 2002). Norma universal menjadi faktor krusial dalam identifikasi kekuatan normatif suatu aktor, dikarenakan norma universal merupakan norma yang akan dipromosikan oleh kekuatan normatif dan dapat mengubah nilai-nilai yang dianut oleh suatu aktor mitra, yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan aktor mitra. Sebagai contoh, salah satu norma universal dari Uni Eropa adalah nilai demokrasi, dan Uni Eropa melalui kekuatan normatifnya dapat mengubah nilai dari negara anggotanya agar menganut kebijakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemenuhan kriteria karakteristik kekuatan normatif dan pemenuhan kriteria faktor penyebaran kekuatan normatif akan digunakan untuk proses analisis kekuatan normatif Tiongkok terhadap Hungaria.

Perbedaan mendasar antara kekuatan normatif Tiongkok dengan kekuatan normatif Eropa terletak dalam bentuk penyebaran dan norma yang dianut. Pertama, Uni Eropa menggunakan serangkaian peraturan hukum atau *acquis communautaire*

sementara Tiongkok menggunakan konsep *Guanxi* atau hubungan (Kavalski, 2013). Identifikasi terhadap nilai-nilai dasar universal yang dipromosikan oleh Tiongkok dapat dilihat dalam “*Major Country Diplomacy with Chinese Characteristics*” atau disingkat menjadi MCDWCC yang pertama kali diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi pada Juni 2013 sebagai “pedoman ilmiah” bagi pemerintahan Tiongkok untuk mencapai tujuan besar Tiongkok (Y. Wang, 2013).

Presiden Tiongkok, Xi Jinping menyatakan bahwa MCDWCC bertujuan untuk “mendorong jenis baru hubungan internasional dan membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.” (Jinping, 2017). Tiongkok berusaha merubah tatanan internasional dan memberikan konsep tatanan alternatif yang berpotensi menantang tatanan internasional saat ini, sesuai dengan konsep kekuatan normatif. Identifikasi dan analisis terhadap kekuatan normatif Tiongkok dapat menjadi topik yang signifikan dalam diskursus Hubungan Internasional kedepannya, mengingat perkembangan Tiongkok dalam konteks politik internasional dan analisis terhadap pengaruh kekuatan normatif Tiongkok terhadap Hungaria dapat menjadi langkah awal untuk melihat seberapa jauh pengaruh dari kekuatan normatif Tiongkok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertipe kualitatif, yakni dengan melakukan analisis pengaruh kekuatan normatif Tiongkok terhadap perubahan nilai-nilai dan kebijakan Hungaria. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan melalui studi literatur yang bersumber pada penelaahan dokumen dari buku, artikel jurnal, makalah, laporan, pernyataan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan sumber penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksplanatif, dimana kekuatan normatif yang dimiliki Tiongkok dan pengaruhnya terhadap Hungaria menjadi alasan dibalik terjadinya perubahan nilai-nilai yang dianut oleh Hungaria dan perubahan terhadap kebijakan Hungaria di Uni Eropa.

PEMBAHASAN

Analisis Karakteristik Kebijakan Luar Negeri Hungaria

Kebijakan luar negeri Hungaria secara historis terbentuk akibat pengaruh dari aktor eksternal. Pengaruh tersebut mempengaruhi nilai-nilai yang dianut oleh Hungaria, yang kemudian mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Hungaria. Hal ini dapat dilihat dari segi historis, dimana pasca Perang Dunia II, Hungaria berada dalam pengaruh Uni Soviet, yang diakui oleh Hungaria memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Hungaria dan mengatur arah kebijakan luar negeri Hungaria (Consulate General of Hungary Los Angeles, 2017). Pengaruh tersebut dilakukan oleh Uni Soviet melalui berbagai kebijakan ekonomi, politik, hingga intervensi militer yang dilaksanakan ke Hungaria agar Hungaria mengimplementasi nilai-nilai yang dipromosikan oleh Uni Soviet (Borhi, 2004).

Pasca runtuhnya Uni Soviet, Hungaria mengubah arah kebijakannya menuju negara yang lebih demokratis dan melalui bergabungnya Hungaria dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004. Proses bergabungnya Hungaria tersebut terlebih dahulu didahului dengan implementasi nilai-nilai dasar Uni Eropa oleh Hungaria (Varga, 2000). Implementasi nilai-nilai dasar Uni Eropa oleh Hungaria tersebut disebabkan oleh upaya dari Uni Eropa untuk merangkul Hungaria melalui

upaya pendekatan diplomatis dari Uni Eropa dan negara-negara anggotanya ke Hungaria. Upaya tersebut menurut Ian Manners merupakan bentuk dari promosi melalui kekuatan normatif Eropa (Manners, 2002). Pembahasan mengenai efektivitas kekuatan normatif Eropa terhadap Hungaria, dapat dilihat melalui program *European Union Enlargement* yang telah dibahas melalui penelitian Alfred Tovias yang membahas bagaimana Uni Eropa melalui kekuatan normatifnya telah berhasil mempromosikan nilai-nilai dasar Uni Eropa ke Hungaria sehingga nilai-nilai tersebut diterapkan oleh Hungaria (Tovias, 2005).

Hasil dari promosi tersebut terlihat dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Hungaria yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Hungaria didasari nilai-nilai yang dianut oleh Hungaria, dan nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai universal yang tertuang dalam Traktat Uni Eropa seperti demokrasi, HAM, dan kebebasan individu (Ministry of Foreign Affairs of Hungary, 2011). Pengaruh dari aktor eksternal menjadi faktor yang signifikan dalam arah kebijakan luar negeri Hungaria. Pembahasan selanjutnya akan melihat bagaimana efektivitas kekuatan normatif Tiongkok, dan bagaimana pelemahan dari kekuatan normatif Eropa terhadap Hungaria dapat mempengaruhi perubahan arah kebijakan luar negeri Hungaria.

Analisis Identifikasi Norma Universal dalam Kekuatan Normatif Tiongkok

Identifikasi terhadap norma universal Tiongkok dapat dilihat melalui kerangka kerja *Major Country Diplomacy with Chinese Characteristics* atau MCDWCC yang menjadi pedoman bagi hubungan luar negeri Tiongkok dan bertujuan untuk membentuk tatanan hubungan internasional baru (Y. Wang, 2013). Xi Jinping dalam pemaparannya menyatakan bahwa penciptaan model baru hubungan internasional tersebut harus didasari tiga nilai universal utama, yakni “Saling Menghormati”, “Keadilan” dan “*Win-win Cooperation*”. Tiongkok akan berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut dalam rangka menciptakan tatanan hubungan internasional baru (Hu, 2018).

Tiga nilai universal tersebut dapat diidentifikasi sebagai norma-norma universal Tiongkok dalam penyebaran kekuatan normatifnya. Perlu dipahami lebih lanjut bahwasannya ketiga norma tersebut merupakan norma yang saling berhubungan, dengan penempatan “Saling Menghormati” sebagai kondisi dasar dalam menindaklanjuti hubungan lebih lanjut, “Keadilan” sebagai prinsip ketika kondisi dasar “saling menghormati” telah terpenuhi, dan “*Win-win Cooperation*” sebagai tujuan (J. Wang, 2018). Oleh karena itu, norma “saling menghormati” terlebih dahulu harus diimplementasikan oleh aktor mitra dalam penyebaran kekuatan normatif Tiongkok. Selain itu, norma “saling menghormati” berhubungan dengan kedaulatan, dimana Tiongkok berupaya untuk menyebarkan pemahaman bahwa kedaulatan masing masing negara, termasuk didalamnya sistem sosial dan kepentingan negara, tidak berhak diganggu oleh aktor lain. Norma ini juga menolak standar ganda yang diterapkan untuk menyudutkan suatu negara, sembari mementingkan pertumbuhan suatu negara dengan karakteristiknya masing-masing (Larson, 2020).

Dengan adanya nilai saling menghormati, maka negara-negara akan secara merdeka memilih jalur pertumbuhannya sendiri, dengan karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh negara tersebut, tanpa adanya intervensi dan penghakiman dari pihak lain.

Norma “keadilan” berhubungan dengan bagaimana hubungan antar negara harus didasari keadilan, sementara norma *win-win cooperation* berhubungan dengan keuntungan bagi kedua pihak, serta menguntungkan bagi dunia secara keseluruhan (Baviera, 2016).

Norma saling menghormati ini akan menjadi norma utama yang akan dianalisis implementasinya oleh pemerintah Hungaria, mengingat signifikansi norma tersebut sebagai norma kondisi awal. Penyebaran norma tersebut akan dianalisis melalui 6 faktor kriteria penyebaran norma yang sudah dijelaskan pada bagian operasionalisasi konsep, dan pemenuhan analisis keberhasilan kekuatan normatif akan dilanjutkan dengan pemenuhan tiga faktor kriteria kekuatan normatif.

Analisis Kekuatan Normatif Eropa di Hungaria: Kontra-Produktif

Efektivitas kekuatan normatif Eropa dalam mempengaruhi nilai-nilai dasar yang dianut oleh Hungaria telah mengalami kemunduran yang ini dibuktikan melalui berbagai pelanggaran Hungaria terhadap nilai-nilai dasar Uni Eropa. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk melihat bagaimana Uni Eropa dapat kehilangan pengaruh kekuatan normatifnya di Hungaria. Terdapat dua alasan utama terjadinya pelemahan tersebut.

Pertama, kebijakan yang ditempuh Uni Eropa dalam mempertahankan nilai-nilai dasar Uni Eropa di Hungaria justru bersifat Kontra-Produktif. Hal ini dibuktikan melalui penelitian oleh Rebecca Pontén yang menjelaskan bagaimana Uni Eropa menggunakan konsepsi “pembeda” dalam menghadapi Hungaria (Pontén, 2022). Konsepsi pembeda merujuk kepada bagaimana Uni Eropa menempatkan posisi identitas Hungaria sebagai suatu aktor yang berbeda dari Uni Eropa, walaupun Hungaria merupakan bagian dari Uni Eropa. Uni Eropa juga menganggap Hungaria sebuah ancaman terhadap integritas Uni Eropa. Hungaria yang “berbeda” kemudian dianggap sebagai suatu entitas yang lebih inferior dibandingkan Uni Eropa dan diperlukan adanya pengawasan terhadap Hungaria oleh Uni Eropa.

Melalui penelitiannya, Pontén menyatakan bahwa pernyataan dan kebijakan Uni Eropa menempatkan Hungaria sebagai aktor “antagonis” bagi Uni Eropa (Pontén, 2022), yang menciptakan kondisi yang tidak efektif terhadap penerimaan nilai-nilai dasar Uni Eropa oleh Hungaria.

Kedua, pelemahan kekuatan normatif Eropa di Hungaria terletak pada karakteristik dari penyebaran kekuatan normatif Eropa yang bersifat *acquis communautaire* atau disebarkan melalui serangkaian kerangka hukum seperti perjanjian dan peraturan resmi (Grabbe, 2016). Serangkaian hukum tersebut juga seringkali disebut *Rule of Law*. Penyebaran ini tidak efektif, dan hal ini dapat terlihat dalam kasus Hungaria. Hungaria masih terus melanggar berbagai hukum Uni Eropa, walaupun telah diberikan sanksi oleh Uni Eropa. Gábor Halmai dalam penelitiannya membahas bagaimana seluruh hukuman yang dijatuhkan kepada Hungaria belum dapat memberikan efek jera bagi Hungaria (Halmai, 2019). Hal ini menunjukkan pelemahan terhadap penyebaran norma Uni Eropa terhadap Hungaria.

Penyebaran Kekuatan Normatif Tiongkok terhadap Hungaria

Analisis penyebaran kekuatan normatif Tiongkok dilaksanakan melalui dua hal, yakni pemenuhan kriteria penyebaran kekuatan normatif dan pemenuhan kriteria karakteristik kekuatan normatif. Pemenuhan kriteria penyebaran kekuatan normatif Tiongkok akan dilaksanakan melalui analisis pemenuhan terhadap salah satu atau semua dari enam metode penyebaran kekuatan normatif. Metode transferensi terlihat dalam inisiasi 16+1, dimana terjadi peningkatan valuasi ekspor-impor antara kedua negara, serta adanya investasi dari Tiongkok ke Hungaria, baik investasi langsung, pembelian perusahaan Hungaria oleh perusahaan asal Tiongkok, dan investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur (Turcsanyi, 2020).

Dalam inisiasi ini Tiongkok mempromosikan norma-norma universalnya melalui berbagai kegiatan dalam inisiasi 16+1. Kegiatan *China-CEEC Cooperation Summit* yang merupakan kegiatan pertemuan tahunan antara negara-negara anggota 16+1 menjadi salah satu kesempatan Tiongkok untuk mempromosikan norma universal. Presiden Xi Jinping pada pidato utamanya dalam *China-CEEC Cooperation Summit 2021* menyatakan bahwa Inisiasi 16+1 merupakan kerjasama yang didasari “rasa saling menghormati” (Jinping, 2021). Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang dalam pertemuan *China-CEEC Cooperation Summit 2016*, menyatakan bahwa inisiasi 16+1 tersebut didasari oleh nilai “saling menghormati” dan tiap negara anggota telah menghormati dan akan terus menghormati jalur pengembangan dan kepentingan-kepentingan utama masing-masing negara anggota.

Norma saling menghormati terus dipromosikan oleh Perdana Menteri Li Keqiang dalam pertemuan-pertemuan tahunan inisiasi 16+1 lainnya, seperti pada tahun 2017 di Budapest, Hungaria (FMPC, 2017). Promosi norma yang dilakukan oleh Perdana Menteri Li Keqiang di Budapest, Hungaria dapat dinilai cukup signifikan dalam perkembangan penyebaran norma “saling menghormati” ini, dikarenakan pada pidato utamanya, Perdana Menteri Li Keqiang secara tegas menyatakan bahwa Tiongkok berkomitmen untuk membentuk tatanan baru dalam hubungan internasional yang berlandaskan nilai-nilai saling menghormati, keadilan, dan *win-win cooperation* (FMPC, 2017). Pidato tersebut juga dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán.

Promosi norma utama oleh Tiongkok telah memenuhi kriteria penyebaran melalui proses transferensi, difusi prosedural serta difusi terbuka. Promosi norma utama juga dilakukan oleh Tiongkok secara spesifik ke Hungaria melalui pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Hungaria, Péter Szijjártó, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi pada September 2022. Pertemuan tersebut membahas bagaimana hubungan antara Tiongkok dengan Hungaria selalu didasari oleh nilai “saling menghormati” (Óry, 2022). Terlihat bahwa Tiongkok sudah memenuhi kriteria faktor penyebaran kekuatan normatif.

Dari segi pemenuhan kriteria karakteristik kekuatan normatif, Terdapat 3 hal penting yang harus dipenuhi, yakni pertama adanya norma universal yang dianut, kedua dijalankannya norma tersebut melalui instrumen dialog, dan ketiga adanya dampak pada aktor mitra. Norma universal atau norma utama telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya, yakni norma “saling menghormati”. Norma utama “saling menghormati” sendiri telah dijalankan dan dipromosikan oleh Hungaria, dan hal tersebut dapat dilihat

melalui berbagai pernyataan dari Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán.

“Everyone should understand the need of mutual respect for the cultural, religious and political traditions of nations” (Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán, 2019)

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Orbán pada *Belt & Road Initiative Forum* yang dilaksanakan di Beijing pada April 2019. Norma saling menghormati juga dipormosikan Menteri Luar Negeri Hungaria, Péter Szijjártó. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, Menteri Szijjártó menyatakan bahwa walaupun kedua negara memiliki pandangan dunia yang berbeda, kedua negara masih tetap dapat membahas berbagai isu penting apabila tetap mengikuti nilai saling menghormati (Hungary Today, 2019).

Selain mempromosikan norma, Hungaria juga melaksanakan dan mengimplementasi norma tersebut dalam kebijakan politiknya. Perdana Menteri Orbán dalam pertemuan perayaan 44 tahun berdirinya *European People's Party* pada Juli 2020 memberi pernyataan yang tertuju kepada negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa, bahwa harus ada nilai saling menghormati di antara mereka, dan mengharapkan agar negara-negara eropa barat tidak memaksakan pandangan mereka pada negara-negara Eropa Timur (POLITICO, 2020). Hal ini dikemukakan untuk menjawab kritisi dari Uni Eropa terhadap kebijakan Hungaria yang dinilai telah melenceng dari nilai-nilai dasar Uni Eropa.

Penerimaan, promosi, dan implementasi norma “saling menghormati” telah dijalankan oleh Hungaria, dan telah dijalankan melalui instrumen dialog sehingga dapat memenuhi poin kedua dalam pemenuhan kriteria kekuatan normatif. Pemenuhan poin ketiga, yakni adanya dampak terhadap aktor mitra atau aktor penerima dapat dilihat melalui kebijakan yang diambil oleh Hungaria. Salah satu bentuk kebijakan yang memperlihatkan hal ini adalah kebijakan mengenai imigran dan pencari suaka. Hungaria telah merumuskan beberapa kebijakan yang tegas dalam menolak masuknya imigran dan pencari suaka. Hal ini menuai berbagai kritik dari Uni Eropa yang menilai bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar Uni Eropa dan mengharapkan Hungaria untuk merubah kebijakannya (DW, 2021).

Perdana Menteri Orbán namun telah secara tegas memberikan pernyataan bahwasannya isu penolakan imigran tersebut merupakan isu terkait identitas dan kedaulatan, dan Uni Eropa tidak berhak untuk mengganggu kedaulatan negara anggotanya, termasuk didalamnya mengenai keputusan Hungaria yang menolak datangnya imigran (Hungary Today, 2017). Melalui pernyataan tersebut, Perdana Menteri Orbán kembali memenuhi implementasi norma saling menghormati. Pernyataan jelas juga dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Hungaria, Péter Szijjártó dimana Menteri Szijjártó menyatakan bahwa Uni Eropa haruslah memutuskan kebijakan dengan basis nilai “saling menghormati” dan menghindari intervensi (Szijjártó, 2019). Hal ini menunjukkan norma tersebut telah digunakan oleh Hungaria sebagai justifikasi terhadap kebijakan-kebijakan Hungaria yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Uni eropa.

Justifikasi tersebut tentunya bukan tanpa dampak bagi Hungaria, dikarenakan Uni

Eropa tetap memberikan kritik serta kecaman terhadap Hungaria (Bogaards, 2018) hingga Komisi Eropa melaporkan Hungaria ke Mahkamah Eropa dengan dalil pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar Uni Eropa (BBC, 2018). Hal tersebut telah memenuhi bagian terakhir dari kriteria pemenuhan kekuatan normatif dan membuktikan bahwa kekuatan normatif Tiongkok telah berhasil dalam menyebarkan dan mengimplementasi norma universal yang berusaha disebarkan oleh Tiongkok. Proses selanjutnya dari penelitian ini adalah analisis mengenai pengaruh implementasi norma tersebut terhadap kebijakan Hungaria dalam kedekatannya dengan Tiongkok.

Pada Juli 2016, Tiongkok menghadapi pengadilan dalam *Permanent Court of Arbitration* atau Mahkamah Arbitrasi Antara Bangsa mengenai sengketa klaim teritorial Laut Tiongkok Selatan. Pasca penyelesaian pengadilan pada 12 Juli 2016, dimana diputuskan kekalahan Tiongkok secara legal, negara-negara anggota Uni Eropa melaksanakan perundingan untuk mengeluarkan pernyataan terkait hasil pengadilan tersebut. Uni Eropa gagal dalam mencapai kata sepakat terhadap posisi yang harus diambil pasca pengadilan sengketa dikarenakan Hungaria menolak untuk memberi pernyataan yang tegas melawan Tiongkok sehingga Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang netral terhadap hasil perundingan, tidak menggunakan kalimat dan bahasa yang secara eksplisit menyerang Tiongkok, dan berakhir mengharapkan penyelesaian masalah sengketa dengan cepat (REUTERS, 2016).

Pasca dikeluarkannya pernyataan netral Uni Eropa tersebut, Menteri Luar Negeri Hungaria, Péter Szijjártó mengeluarkan pernyataan bahwa sengketa haruslah diselesaikan dengan sikap yang damai melalui negosiasi langsung, dan intervensi serta tekanan eksternal dapat memberikan dampak buruk terhadap situasi sengketa tersebut (Szijjártó, 2016). Hal ini memperlihatkan bagaimana Hungaria menerapkan norma “saling menghormati” sebagai alasan dibalik kebijakan veto tersebut. Meskipun demikian, perlu analisis lebih lanjut mengenai alasan dibalik penerimaan norma Tiongkok oleh Hungaria.

Tiongkok sebagai Model Alternatif bagi Hungaria

Alasan Hungaria dalam mengimplementasi norma dan model alternatif yang diusung Tiongkok didasari oleh dua alasan utama. **Pertama**, adanya inkompabilitas Hungaria dengan sistem Uni Eropa. Uni Eropa menganggap Hungaria sebagai negara yang mengalami “*democratic backsliding*” (O’Dwyer & Stenberg, 2022) dan telah berubah menjadi negara “otokrasi elektoral” dengan nilai-nilai “illiberal” (Szent-Iványi & Kugiel, 2020). Hal ini tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar Uni Eropa yang tertuang dalam Hukum Uni Eropa (EUR-LEX, 2020). Pelanggaran tersebut secara resmi dibahas oleh Parlemen Uni Eropa yang memutuskan untuk mengeluarkan reportase terhadap Perdana Menteri Orbán dan Hungaria, menyatakan bahwa Hungaria tak lagi merupakan sebuah negara demokratis dan ada ancaman sistemik serius terhadap implementasi nilai-nilai dasar Uni Eropa apabila hal ini tidak diatasi (BBC, 2022). Uni Eropa melalui Komisi Uni Eropa dan Parlemen Uni Eropa telah melakukan berbagai kritisi terhadap kebijakan Hungaria, hingga menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Eropa. Hal ini menunjukkan bagaimana Uni Eropa berusaha merubah kebijakan-kebijakan dan nilai-nilai yang dianut oleh Hungaria agar kembali sejalan dengan Uni Eropa.

Walaupun bagi Uni Eropa hal ini merupakan upaya untuk menegakan nilai-nilai dasar Uni Eropa, Hungaria di bawah pemerintahan Perdana Menteri Orbán memiliki perspektif lain. Bagi Hungaria, upaya Uni Eropa tersebut dinilai dapat mencederai kedaulatan tak hanya bagi Hungaria, namun juga bagi seluruh negara-negara anggota Uni Eropa. Sistem yang saat ini digunakan oleh Uni Eropa untuk menegakan nilai-nilai Eropa dinilai oleh Hungaria sebagai bentuk pelepasan kedaulatan dan kekuasaan dari negara anggota ke Uni Eropa.

“...Europe by contrast is continually diverted from dealing realistically with threats towards policies that concentrate instead on formulating “European solutions” that solve nothing. For that reason among others, curbing national sovereignty is one of the main dangers for Europe today. There are things against which Brussels alone is powerless, against which we can only defend ourselves individually as nations.

We weaken ourselves when we hand those problems over to the EU. So we must now reconsider all thought, political action and initiative that seek to transfer powers from nation states to Brussels.” (Viktor Orbán, 2017)

Perdana Menteri Orbán telah menyatakan pandangannya untuk kembali mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang berpotensi memberikan kuasa yang dimiliki negara kepada Uni Eropa (Viktor Orbán, 2017).

Dalam kongres ke-29 partai Fidesz Hungaria, Perdana Menteri Orbán memberikan pidato yang juga membahas mengenai kedaulatan Hungaria.

“...the judiciary, media regulation, schools and education all belong to national competency. We want to be sovereign and we do not want, instead of integration, to find ourselves in a United States of Europe.”

Perdana Menteri Orbán kembali menegaskan pentingnya kedaulatan bagi Hungaria, dan Uni Eropa tidak berhak mengatur berbagai kebijakan Hungaria. Dalam pidato yang sama juga, Perdana Menteri Orbán menyatakan pernyataan berikut:

“It is not enough for us to defend ourselves against Brussels, which in itself is a huge task: Brussels must be reformed. But even reform will not be enough: it must be completely renewed, before it disintegrates.”

Melalui pernyataan tersebut, Perdana Menteri Orbán tidak hanya menyatakan bahwa Hungaria tidak sejalan dengan Uni Eropa, namun juga berniat untuk mereformasi Uni Eropa. Dapat dilihat bahwa Perdana Menteri Orbán menginginkan perubahan pada Uni Eropa, yang tidak mengganggu kedaulatan dan kebijakan nasional negara anggotanya, terutama Hungaria.

Kedua, Tiongkok menjadi “aktor penyimpang” Hungaria. Hungaria cenderung memilih sistem alternatif yang diusung oleh Tiongkok. Hal ini dapat dilihat melalui nilai yang dianut oleh Hungaria dan bagaimana nilai tersebut lebih sesuai dengan sistem yang dipromosikan oleh Tiongkok. Salah satu poin yang menjadi kekhawatiran Perdana Menteri Orbán adalah bagaimana Uni Eropa mengganggu kedaulatan Hungaria. Model alternatif Tiongkok memberikan solusi bagi permasalahan tersebut.

Yan Xuetong melalui penelitiannya pada 2019 memberikan penjelasan terhadap perspektif Tiongkok dalam kondisi tatanan internasional yang ideal. Yan menjelaskan bahwa Tiongkok melihat kedaulatan nasional, dan bukan norma-norma internasional, sebagai prinsip fundamental yang harus menjadi sandaran tatanan internasional (Xuetong, 2019). Pandangan tersebut sesuai dengan prinsip kedaulatan yang dianut oleh Hungaria dan model alternatif yang diusung oleh Tiongkok.

*“We joined the European Union because we were offered the prospect of integration. This seemed like a good offer: they could win, and we could win. Integration means that we do things together, and do them in a friendly and cooperative way...
... After experiencing communist bureaucracy, we do not want to be under the yoke of another bureaucracy from the West, with diktats from Brussels.....There was no mention of surrendering important aspects of our culture, traditions and history in favour of supposedly higher principles and ideologies.” (Viktor Orbán, 2021)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana Perdana Menteri Orbán tidak merasakan adanya *win-win cooperation* yang terjadi dalam Uni Eropa dan Hungaria merasa dirugikan akibat keharusan Hungaria untuk “menyerahkan” identitas nasional dan kultural Hungaria demi sejalanannya Hungaria dengan nilai-nilai Uni Eropa, walaupun Hungaria mendapatkan integrasi ekonomi. Permasalahan ini dapat diselesaikan melalui nilai *win-win cooperation* yang diusung melalui MCDWCC oleh Tiongkok.

Hal ini menandakan nilai dan model Uni Eropa tidak memiliki kesesuaian dengan kondisi Hungaria, sementara nilai dan model Tiongkok sesuai dengan kondisi Hungaria, sehingga Hungaria lebih menerima nilai dan model yang diusung oleh Tiongkok. Perdana Menteri Orbán sendiri menyatakan bahwa arah kebijakan Hungaria akan berubah menjadi “demokrasi illiberal” yang menyimpang dari arah politik liberal yang dianut oleh negara-negara barat dan mencontoh arah kebijakan Tiongkok (Puddington, 2022). Hal ini memperlihatkan kekuatan normatif Tiongkok telah berhasil mempromosikan nilai-nilai universal yang diusung Tiongkok ke Hungaria, dan merubah arah kebijakan Hungaria.

KESIMPULAN

Hungaria melalui kebijakan dan pernyataan dari Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán telah menyimpang dari nilai-nilai Uni Eropa dan Tiongkok melalui kekuatan normatifnya memiliki peran yang signifikan dalam penyimpangan tersebut.

Tiongkok melalui kerangka kerja *Major Country Diplomacy with Chinese Characteristics* atau MCDWCC merumuskan model alternatif dalam hubungan internasional yang berdasarkan nilai-nilai universal yang dapat diimplementasi oleh negara-negara di dunia demi mendorong jenis baru hubungan internasional dan membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia (Xi, 2017). Hal tersebut sesuai dengan definisi dari kekuatan normatif, yakni kemampuan suatu aktor untuk mewujudkan atau mengubah sesuatu yang dianggap “normal” dalam

hubungan internasional (Manners, 2002).

Nilai-nilai universal tersebut adalah nilai saling menghormati, nilai keadilan, dan nilai *win-win cooperation* (Hu, 2019). Tiongkok mempromosikan nilai-nilai tersebut ke Hungaria melalui hubungan bilateral yang baik dengan Hungaria, serta kerjasama inisiasi 16+1 antara Tiongkok dengan 16 negara Eropa Tengah dan Timur, termasuk Hungaria. Melalui bukti-bukti yang telah dipaparkan, Hungaria telah menerima, menerapkan dan mempromosikan nilai universal yang diusung oleh Tiongkok tersebut dalam berbagai kesempatan, yakni dalam kebijakan domestik, kebijakan luar negeri, pernyataan dalam lingkup politik domestik, serta pernyataan dalam lingkup hubungan bilateral, multilateral dan organisasi internasional.

Nilai saling menghormati menjadi nilai kunci yang diimplementasikan oleh Hungaria dikarenakan nilai ini mementingkan kedaulatan nasional. Pemerintahan Hungaria menyatakan bahwa Uni Eropa tidak menghormati kedaulatan nasional Hungaria melalui berbagai kritisi dan paksaan dari Uni Eropa agar Hungaria mematuhi nilai-nilai dasar Uni Eropa. Hal ini menyebabkan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán menyatakan keinginannya untuk mereformasi Uni Eropa agar dapat menghormati kedaulatan negara anggotanya. Hal ini juga didorong dari ketidakefektifan kekuatan normatif Eropa dalam menyebarkan nilai-nilai dasar Uni Eropa, baik dikarenakan kebijakan Uni Eropa yang menyudutkan Hungaria serta menganggap Hungaria sebagai aktor yang berbeda, antagonis, dan inferior, maupun dikarenakan kurang efektifnya proses hukum yang dilaksanakan oleh Uni Eropa untuk memberikan efek jera bagi Hungaria.

Keinginan tersebut menjadi alasan Hungaria dalam penerapan nilai universal yang diusung oleh Tiongkok, sekaligus model alternatif Tiongkok yang mengusung kondisi ideal dalam hubungan internasional harus berdasarkan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, implementasi nilai universal yang dipromosikan Tiongkok melalui kekuatan normatifnya oleh Hungaria menjadi penyebab penyimpangan Hungaria dari nilai-nilai Uni Eropa, termasuk didalamnya keputusan Hungaria untuk mendukung Tiongkok secara politis dalam lingkup politik Uni Eropa.

Penelitian mengenai Tiongkok masih relatif jarang dilakukan melalui konsep kekuatan normatif. Penggunaan konsep ini dapat memberikan perspektif baru terhadap diskursus mengenai Tiongkok terutama dari segi non-materil serta nilai, terutama dengan posisi Tiongkok yang terus meningkat dari segi politik dan ekonomi. Penelitian lebih lanjut terhadap kekuatan normatif Tiongkok di Uni Eropa dapat menggunakan lingkup waktu yang lebih kontemporer dan meneliti subjek lain. Penelitian lanjutan dapat juga meneliti secara komparatif antara kekuatan normatif Eropa dan kekuatan normatif Tiongkok dalam mempengaruhi aktor mitra ataupun dampak perubahannya terhadap tatanan hubungan internasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.S. selaku dosen pembimbing 1, Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int. selaku dosen pembimbing 2 dan Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos, MA. selaku dosen penguji 1 yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan

dengan baik.

REFERENSI

- AFP. (2021). *EU warns Hungary to fix anti-LGBTQ law or face action - France 24*.
<https://www.france24.com/en/live-news/20210707-eu-warns-hungary-to-fix-anti-lgbtq-law-or-face-action>
- Baviera, A. S. P. (2016). China's Strategic Foreign Initiatives Under Xi Jinping.
<https://doi.org/10.1142/S2377740016500032>, 2(1), 57–79.
- BBC. (2018, September 12). *EU parliament votes to punish Hungary over "breaches" of core values - BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-45498514>
- BBC. (2022, September 16). *Viktor Orban: Hungary "autocracy" verdict from EU correct, say activists - BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-62925460>
- Bogaards, M. (2018). De-democratization in Hungary: diffusely defective democracy.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1485015>, 25(8), 1481–1499.
- Borhi, L. (2004). *Hungary in the Cold War, 1945-1956: Between the United States and the Soviet Union*. Central European University Press.
<https://www.jstor.org/stable/10.7829/j.ctt2jbn9p>
- Consulate General of Hungary Los Angeles. (2017). *Hungary and the World | Consulate General of Hungary Los Angeles*. <https://losangeles.mfa.gov.hu/eng/page/hungary-and-the-world>
- Denyer, S., & Rauhala, E. (2017, June 19). *Europe divided, China gratified as Greece blocks E.U. statement over human rights*.
<https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/06/19/europe-divided-china-gratified-as-greece-blocks-e-u-statement-over-human-rights/>
- DW. (2021, November 16). *EU court slams Hungary's "Stop Soros" law - DW - 11/16/2021*.
<https://www.dw.com/en/eu-court-slams-hungarys-stop-soros-law/a-59834383>
- EEAS. (2022, April 1). *EU-China Relations factsheet | EEAS Website*.
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-china-relations-factsheet_en
- EUR-LEX. (2020, December 17). *EUR-Lex - 62018CJ0808 - EN - EUR-Lex | Judgment of the Court (Grand Chamber) of 17 December 2020. European Commission v Hungary*.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0808>
- FMPRC. (2017, November 27). *Speech by H.E. Li Keqiang Premier of the State Council of the People's Republic of China At the Sixth Summit of Heads of Government of China and Central and Eastern European Countries*.
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/201711/t20171128_678645.html
- Grabbe, H. (2016). European Union Conditionality and the Acquis Communautaire.
<http://dx.doi.org/10.1177/0192512102023003003>, 23(3).
- Halmay, G. (2019). The Possibility and Desirability of Rule of Law Conditionality. *Hague Journal on the Rule of Law*, 11(1), 171–188. <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0077-2>
- Hungary Today. (2017, July 3). *"The Issue Of Migrants Is Therefore An Issue Of Identity As Well As Sovereignty" - Hungarian Prime Minister Viktor Orbán's National Consultation Speech In Full - Hungary Today*. <https://hungarytoday.hu/migrants-issue-identity-sovereignty-hungarian-orban-speech-full-20779/>
- Hungary Today. (2019, March 11). *Foreign Minister Advocates "Mutual Respect" in Ties with Netherlands - Hungary Today*. <https://hungarytoday.hu/foreign-minister-advocates-mutual-respect-in-ties-with-netherlands/>
- Hu, W. (2018). Xi Jinping's 'Major Country Diplomacy': The Role of Leadership in Foreign Policy Transformation. <https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1497904>, 28(115), 1–14.
- Jinping, X. (2017, November 3). *Full text of Xi Jinping's report at 19th CPC National*

- Congress. .
<https://www.mfa.gov.cn/ce/ceil/eng/zt/19thCPCNationalCongress/t1512045.htm>
- Jinping, X. (2021, February 9). *Keeping up the Momentum and Working Together for A New Chapter in China-CEEC Cooperation - Keynote Speech by Xi Jinping at the China-CEEC Summit - Interpret: China*. <https://interpret.csis.org/translations/keeping-up-the-momentum-and-working-together-for-a-new-chapter-in-china-ceec-cooperation-keynote-speech-by-xi-jinping-at-the-china-ceec-summit/>
- Katzenstein, P. J. (1996). The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. In *The Culture of National Security*. Columbia University Press.
<http://cup.columbia.edu/book/the-culture-of-national-security/9780231104692>
- Kavalski, E. (2013). The struggle for recognition of normative powers: Normative power Europe and normative power China in context.
<https://doi.org/10.1177/0010836713485386>, 48(2), 247–267.
- Krekó, P. (2018, May 30). *Hungary: a Foreign Policy Stress-Test Case for NATO and the European Union? | Heinrich Böll Stiftung | Brussels office - European Union*.
<https://eu.boell.org/en/2018/05/30/hungary-foreign-policy-stress-test-case-nato-and-european-union>
- Larson, D. W. (2020). Can China Change the International System? The Role of Moral Leadership. *The Chinese Journal of International Politics*, 13(2), 163–186.
- Manners, I. (2002). Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 40(2), 235–258.
- Ministry of Foreign Affairs of Hungary. (2011). *Hungary's Foreign Policy after the Hungarian Presidency of the Council of the European Union*.
- O'Dwyer, C., & Stenberg, M. (2022). Local-Level Democratic Backsliding? The Consolidation of Aspiring Dominant-Party Regimes in Hungary and Poland. *Government and Opposition*, 57(3), 508–531.
- OECD. (2020). *Hungary (HUN) Exports, Imports, and Trade Partners | OECD - The Observatory of Economic Complexity*. <https://oec.world/en/profile/country/hun>
- Óry, M. (2022, September 23). *Chinese Investment Contributes to Hungary's Growth*.
<https://hungarytoday.hu/chinese-investment-contributes-to-hungarys-growth/>
- Pepermans, A. (2018). China's 16+1 and Belt and Road Initiative in Central and Eastern Europe: economic and political influence at a cheap price. *Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*, 26(2–3), 181–203.
- POLITICO. (2020, July 8). *EPP's illiberal rebels lay out political vision – POLITICO*.
<https://www.politico.eu/article/epp-rebels-lay-out-political-vision-viktor-orban-janez-jansa-aleksandar-vucic/>
- Pontén, R. (2022). *Normative Power Europe, Challenged at Home?: A discourse analysis exploring EU identity work in responding to the undemocratic turn in Hungary*. Swedish Defence University.
- Puddington, A. (2022, March 28). *Orbán's China Infatuation*.
<https://www.americanpurpose.com/articles/orbans-china-infatuation/>
- Rettman, A. (2021, May 7). *Hungary gags EU ministers on China*.
<https://euobserver.com/world/151801>
- REUTERS. (2016, July 15). *EU's statement on South China Sea reflects divisions | Reuters*.
<https://www.reuters.com/article/southchinasea-ruling-eu-idUSL8N1A130Y>
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. Rajawali Press.
- Szent-Iványi, B., & Kugiel, P. (2020). The Challenge from within: EU Development Cooperation and the Rise of Illiberalism in Hungary and Poland. *Journal of Contemporary European Research*, 16(2), 120–138.
- Szijjártó, P. (2016, July 16). *Statement on the situation in the South China Sea*. <https://2015-2019.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/statement-on-the-situation-in-the-south-china-sea>

- Szijjártó, P. (2019, February 4). *Foreign Minister: Brussels “Lie” Revealed - Hungary Today*. <https://hungarytoday.hu/foreign-minister-brussels-lie-revealed/>
- Tovias, A. (2005). Normative and Economic Implications for Mediterranean Countries of the 2004 European Union Enlargement. *Journal of World Trade*, 39. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.kluwer/jwt0039&id=1135&div=&collection=>
- Trebitsch, P. (2018, January 18). *Orbán: if EU doesn't pay, Hungary will turn to China - BBJ*. <https://bbj.hu/politics/foreign-affairs/visits/orban-if-eu-doesn-t-pay-hungary-will-turn-to-china>
- Turcsanyi, R. (2020). China-CEE Cooperation in the 16+ 1 Platform and its Role in the One Belt, One Road Initiative. *China Belt and Road Initiative Journal: Research Analysis and Perspectives*, 3(3), 164–173.
- Vangeli, A. (2018). Global China and Symbolic Power: The Case of 16 + 1 Cooperation. <https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1458056>, 27(113), 674–687.
- Varga, I. (2000). Development of the Hungarian Foreign Policy in the Last Ten Years A comparison of the foreign policy programs of the post-transition Hungarian governments. *National Security and the Future*, 1(2.), 117–131.
- Viktor Orbán. (2017, January 27). *Hungary And The Crisis Of Europe - By Hungarian Prime Minister Viktor Orbán - Hungary Today*. <https://hungarytoday.hu/hungary-crisis-europe-hungarian-prime-minister-viktor-orban-18029/>
- Wang, J. (2018). Xi Jinping's 'Major Country Diplomacy:' A Paradigm Shift? <https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1497907>, 28(115), 15–30.
- Wang, Y. (2013, June 27). *Exploring the Path of Major-Country Diplomacy With Chinese Characteristics*. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/201306/t20130627_468425.html
- Xuetong, Y. (2019). The Age of Uneasy Peace: Chinese Power in a Divided World. *Foreign Affairs*, 98. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/fora98&id=42&div=&collection=>